



## Program Pembinaan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) di Provinsi Sulawesi Selatan

**Herman<sup>1</sup>, Hikmad Hakim<sup>2</sup>, Muh. Ishak<sup>3</sup>, Sahabuddin<sup>4</sup>, Muh Arifai<sup>5</sup>**

Universitas Negeri Makassar

Email: hermandody@unm.ac.id

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan: a). Secara teori penerapan ilmu administrasi publik dalam bidang kajian olahraga prestasi dalam melaksanakan kebijakan program olahraga prestasi sehingga dapat menjadi acuan dalam setiap kegiatan pelaksanaan program olahraga di berbagai daerah. b). Secara praktis implementasi program olahraga prestasi dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap stakeholder olahraga prestasi antara lain Pemerintah, Akademisi, Pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus KONI Sulawesi Selatan, Dispora Sul-Sel, dan Pengurus Cabang Olahraga. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, kuisioner/angket. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwa Implementasi Program Pusat Pembinaan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh tanggapan setuju dengan persentase 52,4 %, kemudian tanggapan responden sangat setuju dengan tingkat persentase 44.1%, dan selanjutnya beberapa responden beranggapan kurang setuju dalam pelayanan dengan tingkat persentase 3,3%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Pusat Pembinaan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) di Provinsi Sulawesi Selatan tergolong sudah baik namun peneliti berharap peningkatan komunikasi, kemampuan sikap pelaksana, sumberdaya, struktur birokrasi, lingkungan, ukuran dan tujuan, pendanaan, politik dan rekrutmen untuk lebih diperhatikan agar kedepannya program pusat pembinaan olahraga terpadu berkelanjutan di provinsi sulawesi selatan memperoleh hasil maksimal demi tercapainya kejayaan olahraga prestasi di Sulawesi Selatan.

**Kata Kunci:** Pembinaan Olahraga, Terpadu, Berkelanjutan

### PENDAHULUAN

Cabang olahraga yang saat ini tergabung dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ini mencontohkan pesatnya perkembangan prestasi olahraga di Sulawesi Selatan. Melalui Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan presiden tentang rancang bangun olahraga nasional yang terkait dengan pendidikan olahraga, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan industri olahraga, pemerintah pusat Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Kebijakan strategis dikeluarkan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan terkait peningkatan prestasi olahraga daerah dan program pusat pengembangan olahraga terpadu yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Perumusan dan implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan karena

implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam proses kebijakan. Ada beberapa tahapan dalam proses implementasi kebijakan program, di mana unit administrasi melaksanakan alternatif yang dipilih dalam tindakan nyata dengan bantuan mobilisasi sumber daya. Ini adalah hubungan antara proses perumusan kebijakan dan hasil yang diharapkan dari kebijakan, dan tanpa implementasi kebijakan, semua upaya akan sia-sia. Implementasi, yang biasanya berbentuk proyek dan program aksi yang mengandung self-executing dan non-self -pelaksana kebijakan, adalah cara untuk mencapai tujuan program. Tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mengimplementasikan program.

Diawali dengan Program Sul-Sel Lanjutan pada PON Riau XVIII 2012, proses pembuatan program tersebut gagal mencapai target masuk lima besar, seperti yang direncanakan KONI Sul-sel. Sebaliknya, Sulsel finis ke-7 dengan perolehan 19 medali emas dan 17 medali perak, serta 21 medali Perunggu dengan total 57 penghargaan. Kontingen Sulsel pada PON 2021 menduduki peringkat 11, hanya naik 1 peringkat dari sebelumnya dengan total perolehan medali 37 medali, dengan rincian 11 medali emas, 13 medali perak, dan 13 medali perunggu. Tentu hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Gubernur Sulsel, namun ini menjadi masalah besar karena belum mampu mencapai peringkat 5 besar atau bahkan masuk 10 besar yang menjadi pertanyaan besar mengapa Sulawesi Selatan dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang luar biasa.

Program Implementasi pusat pembinaan olahraga terpadu berkelanjutan perlu dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan. Program tersebut dimaksud sebagai arah kebijakan pembinaan olahraga prestasi internasional melalui implementasi program yang efektif dan efisien dengan dasar pemikiran yang rasional.

Olahraga di Sulawesi Selatan adalah yang paling banyak digunakan dan dapat ditemukan di banyak tempat, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Papua. Faktor proses pelaksanaan program inilah yang menentukan apakah atau tidak kinerja olahraga memenuhi standar nasional. Akibatnya, ia berfungsi sebagai model untuk implementasi program dalam banyak hal.

Untuk menjamin keberhasilan, kebijakan yang mendukung pembangunan keolahragaan nasional yang serasi, terpadu, dan berjangka panjang memerlukan pendekatan integratif yang didukung oleh sistem pendanaan yang berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan peningkatan olahraga.

Ada beberapa faktor yang menurut peneliti tidak berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program pusat pembinaan olahraga terpadu yang berkelanjutan, yaitu suatu sistem pembinaan dan pengembangan olahraga menuju prestasi nasional dan internasional. Akibatnya perkembangan prestasi olahraga di Sulsel kita di tingkat nasional tidak menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi daerah Sulsel, dan penelitian ini akan mengkaji lebih dalam beberapa faktor yang mempengaruhi

terselenggaranya Sul- Sel Program Menurut para ahli, faktor-faktor berikut mempengaruhi proses implementasi kebijakan: 1) komunikasi (communications), yang mengacu pada cara di mana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau masyarakat umum; 2) ketersediaan sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan; 3) sikap dan daya tanggap para aktor yang terlibat; 4) struktur organisasi pelaksana kebijakan; 5) lingkungan organisasi; 6) faktor ukuran dan tujuan dasar; 7) politik; 8) pendanaan; dan 9) rekrutmen.

Peneliti mencoba mengkaji pelaksanaan Pusat Pengembangan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) di Sulawesi Selatan berdasarkan fenomena tersebut di atas, khususnya (Pertama) komunikasi terkait intensitas sosialisasi, kejelasan komunikasi, konsistensi pemerintah, dan kebijakan. Kedua, kapasitas SDM dewan pelaksana dan satgas pelaksana, serta penyediaan fasilitas yang mendukung kebijakan Pusat Pengembangan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB), terkait dengan faktor sumber daya. Ketiga, sikap terhadap pelaksanaan Pusat Pengembangan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) di Sulawesi Selatan persepsi, tanggapan, dan tindakan. Keempat, faktor struktur birokrasi berperan penting dalam pembentukan Pusat Pengembangan Olahraga Berkelanjutan Terpadu (P2OTB) di Sulawesi Selatan struktur, pembagian tugas, dan koordinasi pelaksana kebijakan ters. Kelima, kapasitas, stabilitas, dan kompleksitas terkait faktor lingkungan dalam Program Pusat Pengembangan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) Sulawesi Selatan. Keenam, faktor ukuran dan tujuan kesesuaian dan ketepatan target sesuai dengan Pusat Terpadu Berkelanjutan Kebijakan Pembinaan Olahraga (P2OTB). ketujuh, faktor politik yang mempengaruhi dukungan terhadap Pusat Pengembangan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) Sulawesi Selatan Sumber pendanaan Pusat Pengembangan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) Sulsel merupakan faktor kedelapan. Kesembilan) rekrutmen faktor-faktor yang berhubungan dengan proses rekrutmen pelaksana dan kelompok sasaran. Sesuai dengan DBON, ada empat indikator olahraga yang menjadi fokus utama penelitian: Makassar memiliki karate, Gowa memiliki bulu tangkis, Bantaeng memiliki pencak silat, dan Luwu Utara memiliki atletik. latar belakang tersebut menimbulkan rasa ingin tahu penulis untuk penelitian lebih lanjut. "Program Pembinaan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) Provinsi Sulawesi Selatan"

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Kebijakan**

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoah, 2012), yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu.

Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangkamenemecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016). Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin, Rein, & Moran, 2006).

## 2. Teori Komunikasi

Dalam proses komunikasi kebijakan, Edward III, (1980:47), menyebutkan bahwa transmisi, konsistensi dan kejelasan, memberikan pengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan. Para penerima informasi (*target audience*) baik sebagai pengirim (*sender*) maupun penerima (*receiver*) perlu mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap kebijakan.

## 3. Teori Sumber daya

Menurut Edward III (1980), Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber- sumber untuk

melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

#### 4. Teori Sikap

Sikap adalah merupakan reaksi yang timbul atas suatu rangsangan dari situasi atau seseorang, "Sikap (*attitude*) adalah kesiap-siagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, obyek dan situasi yang berhubungan dengannya". Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah reaksi atas rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti dengan kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap mendukung atau menolak.

Komponen afektif yang menyangkut kehidupan emosional seseorang; Komponen kognasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku. Ada tiga tahapan yang harus dilalui seseorang agar dapat meningkatkan kesadarannya dalam memenuhi kewajiban:

1. Aspek kognitif, yang berhubungan dengan gejala pikiran.
2. Aspek afektif, yang berkaitan dengan proses yang menyangkut perasaan tertentu.
3. Aspek psikomotor, yang berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu obyek.

#### 5. Teori Struktur

Menurut Edward III (1980), meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi mungkin masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Hal-hal yang penting dalam struktur birokrasi antara lain efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan standar keberhasilan.

#### 6. Ukuran Dan Tujuan

Menurut Van Meter, Donald S & Van Horn (1975) identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

#### 7. Birokrasi

Kekuasaan, kepentingan dan strategi dan aktor yang terlibat; bahwa yang akan mengimplementasikan mungkin mencakup banyak aktor. Keseluruhan aktor tersebut mungkin secara intensif ataupun tidak, tergantung konten dan program dan

strukturnya dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Masing-masing aktor mungkin memiliki kepentingan-kepentingan dalam kebijakan/program dengan membuat tuntutan (permintaan) atas pengalokasian prosedur-prosedur (Grindle, 1980)

## 8. Pendanaan

Menurut Mazmanian dan sabatier pendanaan tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam program pelayanan masyarakat apapun. Dalam program-program regulative dana juga diperlukan untuk menggaji atau menyewa tenaga dan untuk memungkinkan dilakukannya analisis teknis yang diperlukan untuk membuat peraturan/regulasi tersebut. Secara umum tersedianya dana amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

## 9. Rekrutman

Menurut Henry Simamora (1997:212) Rekrutmen (Recruitment) adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pegawai. (Schermerhorn, 1997) Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan.

## 10. Implementasi Program

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Grindle, (1980) Mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Van Meter, Donald S & Van Horn, (1975:6).

Implementasi kebijakan, menerangkan bahwa: setelah masalah public ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, "implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan".

Sementara dalam setiap kebijakan yang telah dirumuskan semua mengharapkan tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Untuk setiap kegiatan multi event adalah gold (emas). Maka *Keberhasilan program (prestasi)* adalah

merupakan hasil pencapaian target yang telah dirumuskan pada organisasi dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan tujuan program yang telah direncanakan baik program jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang telah dirumuskan dalam organisasi.

Berdasarkan pendapat para ahli model implementasi maka yang berpengaruh terhadap implementasi program dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, yaitu struktur birokrasi Menurut Edward III (1980), meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi mungkin masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Hal-hal yang penting dalam struktur birokrasi antara lain efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan standar keberhasilan.

Pondasi dalam bidang keolahragaan yaitu kebijakan olahraga antara lain: 1). Olahraga pendidikan, 2). Olahraga rekreasi, 3). Olahraga pendidikan yang ketiganya tertuang dalam Undang-Undang no. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dan peraturan presiden no. 22 tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas 2. *Kebijakan olahraga prestasi* adalah keputusan pemerintah dalam mengatasi masalah publik pada bidang olahraga prestasi, tindakan intervensi pemerintah untuk meningkatkan daya saing olahraga tingkat internasional. *Prima* adalah konsep pembinaan, pengembangan olahraga potensial secara nasional yang dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan, modern dan kelola secara professional, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan kebijakan sangat dibutuhkan performance atau kemampuan, integritas dan komitmen dalam proses implementasi kebijakan/program. *Implementasi* adalah proses pelaksanaan program yang melibatkan berbagai unsur- unsur dengan memberdayakan potensi- potensi yang ada untuk mencapai tujuan program yang telah dirumuskan dalam organisasi. Bangunan model implementasi program olahraga diatas dapat dijelaskan bahwa setiap variabel sebagai berikut: 1) *Variabel Komunikasi*: Bahwa hubungan antara pelaksanaan program dengan penerima program yang erat kaitannya dengan sosialisasi atau penyaluran informasi program yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan oleh pemerintah atau pelaksana. 2) *Variabel Sumber daya*: Bahwa pengelola program yang profesional, fasilitas sarana prasarana yang berkualitas dan kuantitas dengan standar internasional. 3) *Variabel Sikap*: Bahwa pengelola yang tanggap secara cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan terhadap proses pelaksanaan program yang disertai dengan komitmen. 4) *Variabel Struktur*: Bahwa pembentukan stuktur kelembagaan yang disesuaikan pada kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek atau unsur-unsur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya terhadap jalur-jalur koordinasi yang efektif. 5) *Variabel Lingkungan*:

Bahwa lingkungan internal dan eksternal dalam program dibutuhkan komitmen, sinkronisasi, koordinasi, sinergitas, dan harmonisasi antara pelaksana program dengan lembaga terkait. 6) *Variabel Ukuran dan tujuan*: Bahwa hasil pencapaian target dari pola rumusan strategis dalam program yang tepat sasaran, efektif dan terukur. 7) *Variabel Politik*: Bahwa dukungan kebijakan serta langkah-langkah strategis dan realistis dalam pelaksanaan program dari lembaga eksekutif dan legislatif terutama yang berkaitan dengan kepentingan politik (*politic of interest*). 8) *Variabel Pendanaan*: Bahwa dukungan penyediaan anggaran dan pembiayaan untuk memenuhi segala kebutuhan dalam pelaksanaan program. 9) *Rekrutmen*: Bahwa Pola penerimaan dan pembentukan pengelola program berbasis kompetensi melalui sistem *fit and propertest* (uji kepatutan dan kelayakan) dengan penilaian yang obyektif.

Sementara dalam setiap kebijakan yang telah dirumuskan semua mengharapkan tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Untuk setiap kegiatan multi event adalah gold (emas). Maka *Keberhasilan program (prestasi)* adalah merupakan hasil pencapaian target yang telah dirumuskan pada organisasi dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan tujuan program yang telah direncanakan baik program jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang telah dirumuskan dalam organisasi.

## 11. Kebijakan Olahraga di Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan, 2021 Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pusat Pembinaan Olahraga Terpadu yang Berkelanjutan dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Gubernur Sulawesi Selatan Menimbang Bahwa untuk meningkatkan dan mendorong pengembangan keolahragaan daerah diperlukan pembinaan secara sistematis, terencana, terukur, berkesinambungan, dan modern melalui Desain Besar Olahraga Nasional akan bersinergi dengan meningkatnya prestasi atlet daerah di tingkat nasional maupun internasional; Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah Provinsi berwenang melakukan pembinaan dan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Desain Besar Olahraga Nasional; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan dengan pendekatan Penelitian Kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang program pusat pembinaan olahraga berkelanjutan di Sulawesi selatan. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan skala likert. Analisis data dengan menggunakan skala likert untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat responden terkait variabel-variabel yang digunakan dalam

permasalahan pertama. Analisis variabel didasarkan pada akumulasi berbagai indikator yang selanjutnya diinterpretasikan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi para responden terhadap variabel-variabel penelitian, maka jarak interval setiap kategori pernyataan atau gabungan beberapa pernyataan diukur dengan menggunakan metode statistik

Selanjutnya dibuatlah tabel distribusi frekuensi dari tiap-tiap tanggapan responden untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel penilaian masuk dalam kategori sangat setuju (SS) dengan nilai 5, setuju (S) dengan nilai 4, kurang setuju (KS) dengan nilai 3, tidak setuju (TS) dengan nilai 2, dan sangat tidak setuju (STS) dengan nilai 1, yang selanjutnya dibuat pengklasifikasian yang mengacu pada ketentuan yang dikemukakan oleh Umar (2005) dimana rentang skor diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Ket:

Skor Tertinggi = Bobot tertinggi x jumlah item :  $5 \times 1 = 5$

Skor Terendah = Bobot terendah x jumlah item :  $1 \times 1 = 1$

Jumlah Klasifikasi : 5

Rentang Skala =  $(5-1) / 5 = 0,8$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut maka dapat dibuatkan skala penilaian pada tabel 3.1 berikut:

Tabel. Skala Penilaian Jawaban Responden Untuk Masing-Masing Item Pertanyaan.

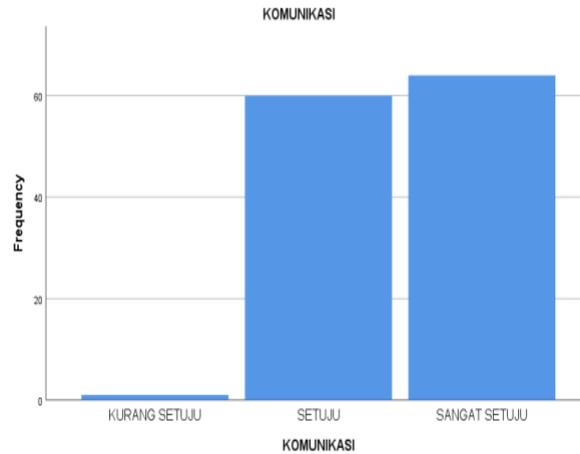
No	Skala Penilaian	Kriteria
1	1.00 - 1.80	Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Baik
2	1.81 - 2.60	Tidak Setuju/Tidak Baik
3	2.61 - 3.40	KurangSetuju/Kurang Baik
4	3.41 - 4.20	Setuju/Baik
5	4.21 - 5.00	Sangat Setuju/Sangat Baik

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Program Pusat Pembinaan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) di Sulawesi Selatan

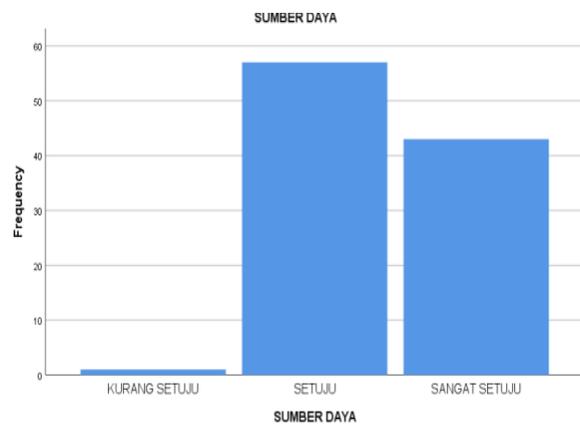
Berdasarkan hasil analisis deskriptif mengenai implementasi program pusat pembinaan olahraga terpadu berkelanjutan (P2OTB) di Sulawesi Selatan.

### A. Komunikasi



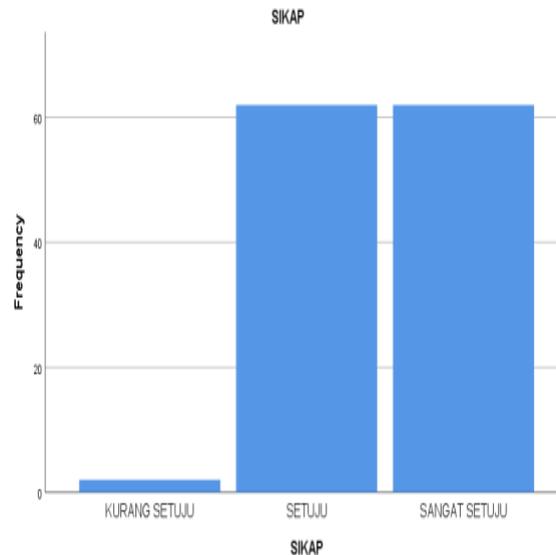
Berdasarkan tabel 4.30 diatas diketahui bahwa penelitian P2OTB pada indikator komunikasi dapat dilihat dengan beberapa tanggapan responden memilih sangat setuju dengan tingkat persentase sebesar (51,2%), selanjutnya 60 orang beranggapan setuju dengan tingkat persentase (48%) dan 1 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase (0,8%). Dengan demikian P2OTB pada indikator komunikasi dapat dikatakan sangat baik.

### B. Sumber Daya



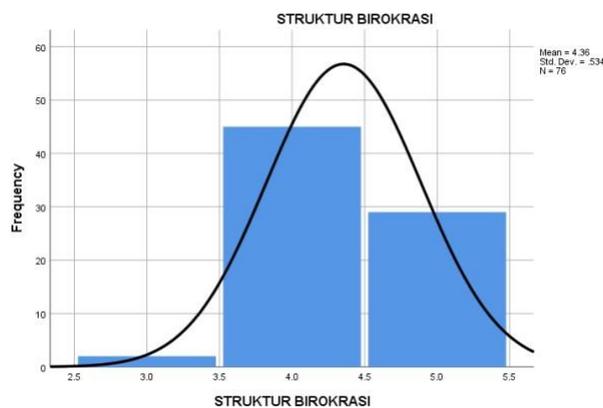
Berdasarkan tabel 4.31 diatas diketahui bahwa penelitian P2OTB pada indikator sumber daya dapat dilihat dengan beberapa tanggapan responden memilih setuju dengan tingkat persentase sebesar (56,4%), selanjutnya 43 orang beranggapan setuju dengan tingkat persentase (42,6%) dan 1 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase (1%). Dengan demikian P2OTB pada indikator sumber daya dapat dikatakan baik.

### C. Sikap



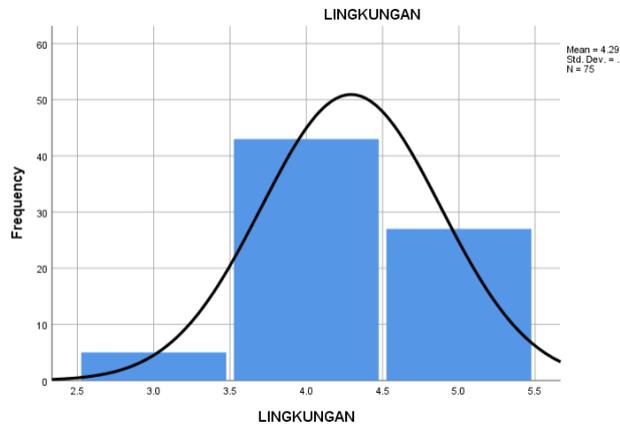
Berdasarkan tabel 4.32 diatas diketahui bahwa penelitian P2OTB pada indikator sikpa dapat dilihat dengan beberapa tanggapan responden memilih sangat setuju dengan tingkat persentase sebesar (49,2%), selanjutnya 62 orang beranggapan setuju dengan tingkat persentase (49,2%) dan 2 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase (1,6%). Dengan demikian P2OTB pada indikator sikpa dapat dikatakan baik.

### D. Struktur Birokrasi



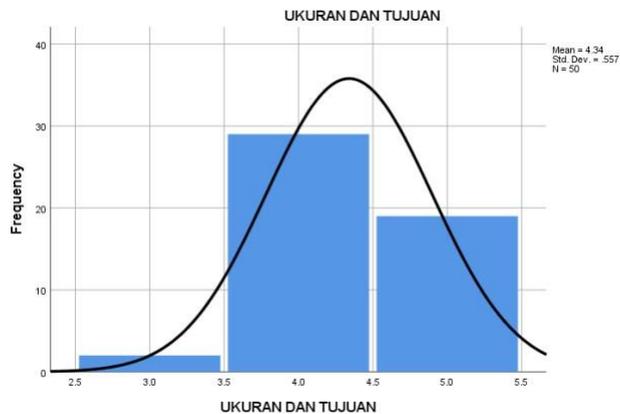
Berdasarkan tabel 4.33 diatas diketahui bahwa penelitian P2OTB pada indikator struktur birokrasi dapat dilihat dengan beberapa tanggapan responden memilih setuju dengan tingkat persentase sebesar (38,2%), selanjutnya 29 orang beranggapan sangat setuju dengan tingkat persentase (59,2%) dan 2 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase (2,6%). Dengan demikian P2OTB pada indikator struktur birokrasi dapat dikatakan baik.

### E. Lingkungan



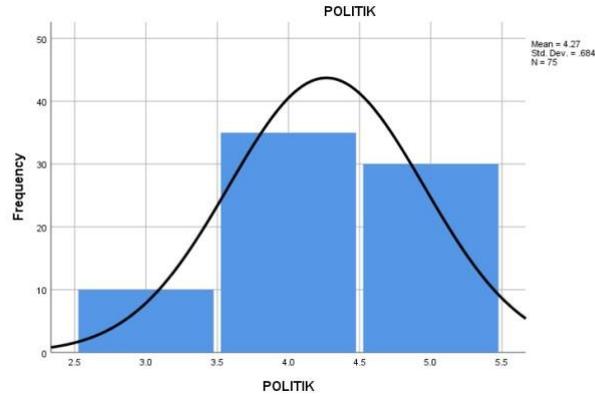
Berdasarkan tabel 4.34 diatas diketahui bahwa penelitian P2OTB pada indikator lingkungan dapat dilihat dengan beberapa tanggapan responden memilih setuju dengan tingkat persentase sebesar (57,3%), selanjutnya 27 orang beranggapan sangat setuju dengan tingkat persentase (36%) dan 5 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase (6,7%). Dengan demikian P2OTB pada indikator lingkungan dapat dikatakan baik.

### F. Ukuran dan Tujuan

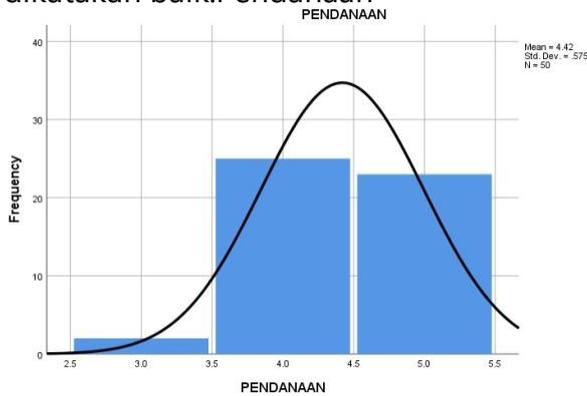


Berdasarkan tabel 4.35 diatas diketahui bahwa penelitian P2OTB pada indikator ukuran dan tujuan dapat dilihat dengan beberapa tanggapan responden memilih setuju dengan tingkat persentase sebesar (58%), selanjutnya 19 orang beranggapan sangat setuju dengan tingkat persentase (38%) dan 2 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase (4%). Dengan demikian P2OTB pada indikator ukuran dan tujuan dapat dikatakan baik.

### G. Politik

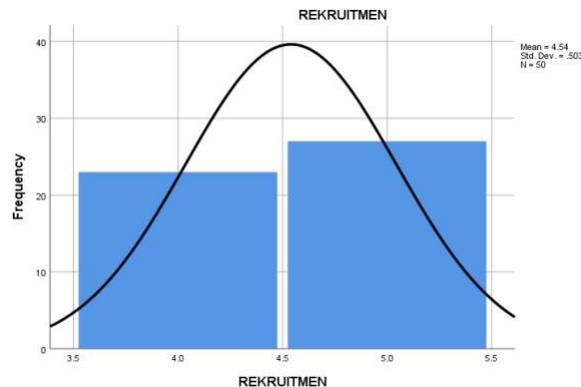


Berdasarkan tabel 4.36 diatas diketahui bahwa penelitian P2OTB pada indikator politik dapat dilihat dengan beberapa tanggapan responden memilih setuju dengan tingkat persentase sebesar (46,7%), selanjutnya 30 orang beranggapan sangat setuju dengan tingkat persentase (40%) dan 10 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase (13,3%). Dengan demikian P2OTB pada indikator politik dapat dikatakan baik.



Berdasarkan tabel 4.37 diatas diketahui bahwa penelitian P2OTB pada indikator pengadaan dapat dilihat dengan beberapa tanggapan responden memilih setuju dengan tingkat persentase sebesar (50%), selanjutnya 23 orang beranggapan sangat setuju dengan tingkat persentase (46%) dan 2 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase (4%). Dengan demikian P2OTB pada indikator pendanaan dapat dikatakan baik.

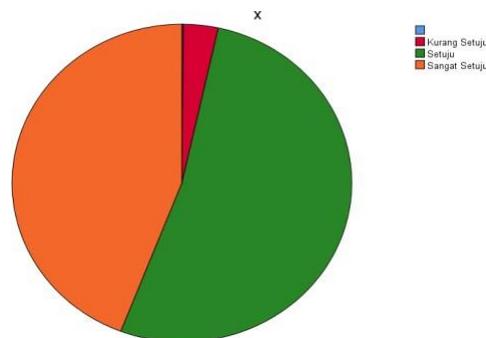
## H. Rekrutmen



Berdasarkan tabel 4.38 diatas diketahui bahwa penelitian P2OTB pada indikator rekrutmen dapat dilihat dengan beberapa tanggapan responden memilih sangat setuju dengan tingkat persentase sebesar (54%), dan 23 orang beranggapan setuju dengan tingkat persentase (46%). Dengan demikian P2OTB pada indikator rekrutmen dapat dikatakan sangat baik.

Dari beberapa indikator dalam penelitian, adapun hasil dari rekapitulasi keseluruhan sebagai berikut:

### Rekapitulasi Analisis Data Keseluruhan



Berdasarkan gambar 4.1 telah diketahui bahwa Implementasi Program Pusat Pembinaan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh tanggapan setuju dengan persentase 52,4 %, kemudian tanggapan responden sangat setuju dengan tingkat persentase 44.1%, dan selanjutnya beberapa responden beranggapan kurang setuju dalam pelayanan dengan tingkat persentase 3,3%.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif mengenai Implementasi Program Pusat Pembinaan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan beberapa variabel yang ditentukan sebelumnya yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, Struktur Birokrasi, Lingkungan, Ukuran dan Tujuan, Politik, Pendanaan, dan Rekrutmen didapatkan hasil rekapitulasi analisis data perindikator dimana pada

indikator komunikasi dan rekrutmen didapatkan hasil yang sangat baik, dan indikator yang tergolong baik diantaranya indikator sumber daya, sikap, struktur birokrasi, lingkungan, ukuran dan tujuan, politik, dan pendanaan.

Adapun uraian persentasi pada setiap indikator yaitu (a) Komunikasi, didapatkan 64 responden memilih sangat setuju dengan tingkat persentase sebesar 51,2%, selanjutnya 60 orang beranggapan setuju dengan tingkat persentase 48% dan 1 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase 0,8%. (b) Sumber Daya, 57 orang responden memilih setuju dengan tingkat persentase sebesar 56,4%, selanjutnya 43 orang beranggapan setuju dengan tingkat persentase 42,6% dan 1 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase 1%. (c) Sikap, didapatkan 62 responden memilih sangat setuju dengan tingkat persentase sebesar 49,2%, selanjutnya 62 orang beranggapan setuju dengan tingkat persentase 49,2% dan 2 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase 1,6%. (d) Struktur Birokrasi, didapatkan 45 responden memilih setuju dengan tingkat persentase sebesar 38,2%, selanjutnya 29 orang beranggapan sangat setuju dengan tingkat persentase 59,2% dan 2 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase 2,6%. (e) Lingkungan, didapatkan 43 responden memilih setuju dengan tingkat persentase sebesar 57,3%, selanjutnya 27 orang beranggapan sangat setuju dengan tingkat persentase 36% dan 5 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase 6,7%. (f) Ukuran dan Tujuan, didapatkan 29 responden memilih setuju dengan tingkat persentase sebesar 58%, selanjutnya 19 orang beranggapan sangat setuju dengan tingkat persentase 38% dan 2 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase 4%. (g) Politik, didapatkan 35 responden memilih setuju dengan tingkat persentase sebesar 46,7%, selanjutnya 30 orang beranggapan sangat setuju dengan tingkat persentase 40% dan 10 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase 13,3%. (h) Pendanaan, didapatkan 25 responden memilih setuju dengan tingkat persentase sebesar 50%, selanjutnya 23 orang beranggapan sangat setuju dengan tingkat persentase 46% dan 2 orang yang beranggapan kurang setuju dengan tingkat persentase 4%. Dan (i) Rekrutmen, didapatkan 27 responden memilih sangat setuju dengan tingkat persentase sebesar 54%, dan 23 orang beranggapan setuju dengan tingkat persentase 46%.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data keseluruhan diperoleh data bahwa tanggapan responden didominasi oleh tanggapan setuju dengan persentase 52,4 %, kemudian sangat setuju dengan tingkat persentase 44.1%, dan selanjutnya beberapa responden beranggapan kurang setuju dalam pelayanan dengan tingkat persentase 3,3%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Pusat Pembinaan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) di Provinsi Sulawesi Selatan tergolong sudah baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dengan judul "Program Pusat Pembinaan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) di Provinsi Sulawesi Selatan" yang ditinjau Sumber Daya disimpulkan bahwa Program Pusat Pembinaan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) di Provinsi Sulawesi Selatan tergolong dalam kategori baik.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas telah ditemukan hasil penelitian Program Pusat Pembinaan Olahraga Terpadu Berkelanjutan (P2OTB) di Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik. Hal tersebut dapat ditingkatkan melalui peningkatan beberapa factor yaitu komunikasi, kemampuan sikap, sumber daya, struktur, lingkungan, ukuran dan tujuan, pendanaan, politik dan rekrutmen agar program terlaksana secara maksimal demi tercapainya kejayaan olahraga prestasi di Sulawesi Selatan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington. Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. University Press Princeton New Jersey.
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>
- Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M. (2006). The Public and its Policies. *The Oxford Handbook ff Public Policy* (pp. 3-35). New York: Oxford University Press.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101-105. Retrieved from <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851>
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Presiden No. 22 tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. (2021). *Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pusat Pembinaan Olahraga Terpadu yang Berkelanjutan*.
- Undang-Undang no. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. (2005).
- Van Meter, Donald S & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Concentual Framework. *Administration and Society*, 6(4), 445-485.